

Rilis Koalisi APBN Untuk Kesejahteraan, Sabtu 15 Agustus 2015

Tanggapan atas NOTA RAPBN 2016 : Nawacita Setengah Tiang

Penyampaian Nota RAPBN 2016

Presiden Jokowi (14/8) telah membacakan Nota RAPBN 2016 dalam sidang kenegaraan di DPR. Dalam penyampaiannya anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp 558,7 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.

Pada intinya, dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional, kebutuhan pendanaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2016 diarahkan untuk kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

Pertama, melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan. *Kedua*, meningkatkan efektivitas pelayanan program Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. *Ketiga*, mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. *Keempat*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran. *Kelima*, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik. *Keenam*, mendukung desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Dana Alokasi Khusus. *Ketujuh*, melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional. *Kedelapan*, menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Inti sari dari arahan alokasi diatas, diarahkan sebagai penjabaran Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa, akan dilakukan beberapa perubahan dalam Alokasi RAPBN 2016 :

1. *Pertama*, meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sehingga lebih besar dari anggaran belanja ementerian/Lembaga. Hal itu mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. *Kedua*, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.
3. *Ketiga*, melakukan reformulasi dan penguatan kebijakan alokasi Transfer ke Daerah, khususnya kebijakan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah.

4. *Keempat*, meningkatkan alokasi Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tanggapan Nota RAPBN 2016

Secara makro, tidak ada revolusi mental pengelolaan anggaran dalam RAPBN 2016, tidak ada optimalisasi pendapatan dan penanganan defisit serta antisipasi krisis.

1. Belum ada optimalisasi pendapatan Negara.

Pendapatan Negara pada RAPBN 2016 ditargetkan sebesar Rp. 1.848,1 Triliun Rupiah, jumlah ini **hanya naik Rp. 86,5 Triliun** dari APBN P 2015 sebesar Rp 1.761,8 Triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan hanya ditargetkan mencapai sebesar Rp1.565 Triliun atau sebesar 84,7 persen, hanya naik Rp. 76 Triliun dari APBNP 2015 sebesar Rp. 1.489,2 triliun.

Sedangkan PNPB dalam RAPBN 2016 sebesar Rp. 280 Triliun, atau sebesar 15,2 persen, **hanya naik Rp. 11 triliun** dibandingkan dengan APBNP 2015 sebesar Rp. 269 Triliun. Sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp. 2 triliun atau sebesar 0,1 persen.

2. Belanja Negara terus meningkat, Belanja Kesehatan Justru Turun.

Belanja Negara pada RAPBN 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.121,3 triliun, naik Rp. 137 Triliun dibandingkan dengan APBNP 2015 sebesar Rp. 1.984,1 Triliun. Sektor kenaikan terbanyak terjadi pada belanja Lembaga Negara, sedangkan belanja Kementrian justru menurun. Misalnya, belanja kesehatan Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp18.685,3 miliar, **menunjukkan penurunan sebesar 22,8 persen** apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp24.208,5 miliar. Alokasi ini diklaim telah memenuhi amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa alokasi anggaran kesehatan adalah sebesar 5 persen dari belanja negara. **Padahal realitanya, anggaran kesehatan belum sesuai dengan amanat konstitusi.**

3. Defisit selalu meningkat, akibatnya penarikan utang juga meningkat.

Defisit RAPBN 2016 ditaksir sekitar Rp. 273 Triliun, naik Rp. 55 Triliun dibandingkan dengan APBNP 2015 yang hanya Rp. 222 Triliun. Untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah menargetkan utang sebesar Rp. 183,4 Triliun, naik Rp. 28 triliun dari APBNP 2015 Rp 155 triliun. Kenaikan hutang tersebut terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp. 176 Triliun dan utang luar negeri sebesar Rp. 16 Triliun.

4. BUMN belum dijadikan prioritas sebagai tiang perekonomian Negara sebagai sumber peningkatan pendapatan Negara.

Pendapatan bagian laba BUMN pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp 31 Triliun , lebih rendah sebesar Rp 5. Triliun atau 15,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015 dan perkiraan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 36 triliun.. Setiap tahun, target penerimaan dari BUMN selalu turun, seperti target APBN 2015 sebesar Rp. 44 Triliun.

Pada APBNP 2015, sebenarnya beberapa BUMN mendapatkan alokasi PMN sekitar RP. 63 Triliun, namun Negara sepenuhnya tidak merasakan timbal balik dari penerimaan BUMN>

5. Belanja Subsidi Untuk Rakyat terus menurun, sasaran subsidi belum tepat sesuai kebutuhan rakyat.

Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan mencapai Rp201.363,6 miliar. Jumlah tersebut menurun Rp10.740,8 miliar bila dibandingkan dengan pagu Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp120.957,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp70.957,2 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp50.000,0 miliar. Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp80.406,4 miliar, terdiri atas: (1) subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar; (2) subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar; (3) subsidi benih sebesar Rp1.023,8 miliar; (4) subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar; (5) subsidi bunga kredit program sebesar Rp16.474,5 miliar; (6) subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.099,1 miliar.

6. Transfer Daerah meningkat, dana Desa Meningkat namun difokuskan pada Dana Alokasi Khusus di Kementrian sehingga masih terpusat. Kesiapan Daerah dikhawatirkan dalam pengelolaan.

Dalam RAPBN 2016 ini, peningkatan signifikan terjadi pada transfer ke daerah dan desa dari APBNP 2015 sebesar Rp. 664 Triliun, naik Rp. 117 triliun pada RAPBN 2016 menjadi Rp. 782 Triliun. Dari alokasi tersebut, dana transfer ke daerah sebesar Rp. 91 Triliun dan dana desa naik Rp. 26 Triliun menjadi Rp. 47 Triliun. Untuk transfer daerah ini patut diapresiasi namun kesiapan daerah dalam pengelolaan masih menjadi pekerjaan rumah.

7. Belanja Infrastruktur terus meningkat, namun infrastruktur untuk Kerakyatan Berkurang (perumahan rakyat).

Anggaran Infrastruktur pada RAPBN 2016 meningkat Rp. 313 Triliun dari APBNP tahun 2015 sebesar Rp. 290 Triliun. Meningkat Rp. 23 Triliun Rupiah. Namun, dari alokasi tersebut, anggaran perumahan rakyat justru

menurun. Anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp 23 Triliun, yang berarti lebih rendah sebesar 9,7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp 25 triliun.

8. Belanja Maritim mengalami penurunan dan belum terfokus pada penguatan infrastruktur belum pada penguatan masyarakat nelayan dan maritim.

Dalam RAPBN 2016 kelompok bidang Kemaritiman direncanakan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp80.748,9 miliar pada RAPBN tahun 2016. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12.414,2 miliar atau 13,3 persen bila dibandingkan dengan APBN tahun 2015 sebesar Rp93.163,2 miliar. Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami kenaikan Rp. 5 Triliun dari APBN 2015 sebesar Rp. 10 Triliun menjadi Rp. 15 Triliun pada RAPBN 2016.

Kenaikan Rp. 5 Triliun pada kementerian kelautan banyak digunakan untuk mendorong infratraktur kelautan, tetapi belum menyentuh pada pemberdayaan masyarakat nelayan dan maritim.

Kesimpulan

1. Dari hasil tanggapan atas Nota RAPBN 2016 dan delapan prioritas arahan kebijakan, bisa disimpulkan bahwa anggaran RAPBN belum dapat mencerminkan dan mendukung kedepalan kebijakan tersebut.
2. Khusus untuk implementasi nawacita, masih terkesan setengah tiang. Karena, kenaikan dana transfer daerah tidak diberikan langsung kepada daerah, namun Dana Alokasi Khusus melalui Kementerian. Formula Implementasi inipun belum didukung dengan Perbaikan revisi UU perimbangan Keuangan Pusat dan daerah yang masih menciptakan ketimpangan daerah. Selain itu, daerah dikhawatirkan semakin tergantung pada pendapatan dari pusat.
3. Untuk alokasi dana desa, peningkatan tidak signifikan dan wajar karena sesuai dengan amanat UU Desa sebesar 60 persen pada tahun 2016 atau sekitar 40-50 Triliun.

Rekomendasi

1. Pemerintah seharusnya, meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara dengan cara melakukan koreksi terhadap kebijakan perpajakan dan non pajak seperti peningkatan pendapatan BUMN dan Sumberdaya Alam.
2. Pemerintah seharusnya menekan defisit dan mengurangi utang dalam dan luar negeri.
3. Pemerintah seharusnya meningkatkan belanja subsidi pengalihan dari pengurangan subsidi BBM menjadi subsidi dalam bentuk yang bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Pemerintah seharusnya meningkatkan belanja kesehatan sesuai amanat konstitusi menjadi minimal diatas 5 persen dari APBN.
5. Tranfer dana ke daerah harus diformulasi agar jangan terjadi ketergantungan daerah dengan pusat. Perlu dukungan revisi aturan hubungan keuangan pusat dan daerah.
6. Dana infrastuktur seharusnya banyak diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat berupa sandang pangan dan papan. Bukan hanya untuk memfasilitasi proyek investor.
7. Dana alokasi untuk Kemaritiman masih terfokus pada infrastruktur perhubungan namun belum menyentuh pada masyarakat nelayan dan pemberdayaan masyarakat maritim.
8. DPR perlu lebih jeli dalam membuat tanggapan dalam pembahasan dan penetapan APBN 2016 agar sesuai dengan amanat konstitusional untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kami **Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat** juga akan menyampaikan hasil kajian kami berupa **APBN ALTERNATIF VERSI MASYARAKAT SIPIL** kepada DPR dan Pemerintah untuk perbaikan alokasi politik anggaran dalam pembahasan RAPBN 2016 agar dapat sesuai dengan peta jalan mensejahterakan rakyat.

Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat

FITRA, Koalisi Anti Utang (KAU), PRAKARSA, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) , Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), YAPPIKA, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat - P3M

CP :

Yenny Sucipto	FITRA	081333111446
Ah Maftuchan	PRAKARSA	085277774448
Dani Setiawan	KAU	08129671744
Ridwan Darmawan	IHCS	081514284109
Abdul Halim	KIARA	081553100259
Abdul Waidl	P3M	081280821339
Hendrik Rosdinar	YAPPIKA	08111463983
Apung Widadi	FITRA	085293939999